

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang saya lakukan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemungutan Pajak Parkir menggunakan sistem *Self Assesment* yang merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan jumlah besaran sesuai dengan *omzet* bulanan pemasukan dengan menggunakan SPTPD. Pajak Parkir yang dipungut sangat menentukan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Saat ini di Kota Sukabumi terdapat 15 tempat lahan parkir yang aktif dan masih terdaftar secara resmi sebagai wajib.
2. Penerimaan Pajak Parkir di Kota Sukabumi bisa dilihat dari penerimaan pendapatan asli daerah. Terdapat target dan realisasi yang telah ditentukan setiap tahunnya. Perkembangan kendaraan di Kota sukabumi setiap tahunnya memang meningkat akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 penerimaan dari sektor pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena pada saat itu ada beberapa wajib pajak yang sedang melakukan perubahan manajemen dan perubahan bangunan lahan parkir. Sehingga

berdampak pada berkurangnya lahan parkir yang dijadikan untuk penerimaan sektor pajak parkir.

3. Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi terdiri dari beberapa bagian, yaitu :
 - a. Pendataan Wajib Pajak
 - b. Pendaftaran NPWPD
 - c. Penetapan Pajak Parkir
 - d. Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Parkir
4. Terdapat 2 (dua) kendala yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal, kegiatan internal seperti pengontrolan dari aparatur yang masih kurang sedangkan dari faktor eksternal seperti adanya wajib pajak yang belum secara benar melaporkan kewajibannya.
5. Upaya yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi, meliputi: Pendataan, Penyuluhan dan Piutang, Penagihan dan Pengendalian, Upaya Pengelolaan Pajak Parkir diantaranya dengan penggunaan sistem online dan pemasangan alat *transaction monitoring device* (TMD) atau *toppingbox*.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di badan pengelolaan keuangan daerah kota sukabumi, penulis mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Perlu adanya penambahan petugas yang ada di ruang lingkup kantor ataupun yang ada di lapangan supaya bisa memantau Kondisi Pajak Parkir yang ada di Kota Sukabumi atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang mengelola parkir.
2. Perlu dilakukannya pendataan wajib pajak untuk mengetahui apakah masih ada usaha Pajak Parkir yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, sehingga bisa meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah.
3. Perlu dioptimalkan pelayanan parkir sesuai dengan Prosedur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Sukabumi
4. Perlu diterapkan sanksi tegas bagi pegawai yang lalai dalam bekerja dan melakukan penyelewengan dengan Wajib Pajak, maupun bagi Wajib Pajak yang nunggak atau keberatan membayar pajaknya.
5. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada petugas supaya paham dan sadar akan kewajibannya melaporkan pajak.